



BERKURANG HINGGA 81 PERSEN

Penerimaan Dana Insentif Daerah Anjlok

YOGYA (KR) - Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemkot Yogya pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan atau hingga 81 persen. Jika dua tahun lalu mencapai Rp 40 miliar, maka kali ini hanya Rp 7,5 miliar. Anjloknya penerimaan DID tersebut masih menimbulkan pertanyaan di kalangan legislatif maupun eksekutif.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, Minggu (26/3), menjelaskan DID tersebut menjadi kewenangan Kementerian Keuangan RI. Diakui, setiap tahun Pemkot Yogya menerima insentif antara Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar. "DID tahun ini merupakan yang paling rendah. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, anjlok," ungkapnya.

Kadri menjelaskan, terdapat dua variabel utama guna memperoleh DID. Yakni minimal opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil laporan keuangan daerah, dan penyusunan APBD tepat waktu. Dari kedua variabel atau indikator utama tersebut, berhasil dipenuhi Pemkot Yogya. Apalagi hasil laporan keuangan daerah menunjukkan nilai tertinggi atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, ada variabel tambahan yang turut menjadi penilaian oleh pemerintah pusat. Di antaranya indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. "Bisa jadi pusat menilai pemda tidak bekerja. Kementerian Keuangan sama sekali tidak memberikan penjelasan. Kami hanya diberi tahu jika DID tahun ini merupakan paling minimal, yakni Rp 7,5 miliar," urainya.

Kadri menuturkan, pemanfaatan DID sudah dijabarkan oleh Kementerian Keuangan. Selama ini paling banyak terdotal untuk biaya operasional pendidikan, salah satunya untuk memberikan honor tenaga pendidik. Namun meski ada penurunan yang cukup signifikan, menurutnya tidak akan berimbas pada kegiatan yang sudah rutin dilakukan.

"DID ini kan sifatnya bonus dari pusat. Kalau tahun ini anjlok, berarti pos pendapatan berkurang, tapi kegiatan tetap jalan karena masih ada pos lain yang bisa dimanfaatkan," imbuhnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khairi, mengaku eksekutif seharusnya meminta penjelasan secara resmi ke Kementerian Keuangan. Apalagi indikator utama untuk memperoleh insentif tersebut mampu terpenuhi. Hasil klarifikasi dari Kementerian Keuangan tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pembangunan.

Oleh karena itu, jika penyebab utama anjloknya DID ialah lantaran indikator tambahan yang tidak sesuai target pemerintah pusat, maka tugas pejabat walikota untuk menggenjot. Terlebih, untuk pengentasan kemiskinan sudah ada Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) hingga tingkat kelurahan. "Tugas Pemkot untuk mendesak pusat untuk secara resmi menjelaskan penyebabnya. Supaya pembenahan pembangunan berdasarkan pada evaluasi yang sebenarnya," tandasnya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005